

Rupiah dalam Kompetisi Pilpres

KETANGGUHAN rupiah kembali diuji menjelang pemilihan presiden pilpres 9 Juli nanti. Selasa (24/6) rupiah membus level psikologis baru di level 12.000 per USD. Persaingan ketat antara dua pasangan calon presiden-wakil presiden, tampaknya, cukup mengangruti persepsi pasar terhadap masa depan ekonomi kita. Itu menjadi pertanda bahwa rupiah masih rentan terhadap situasi politik lama tahunan, terutama pilpres.

Berbeda dengan di negara-negara maju yang tingkat korupsinya sudah rendah, pilpres umumnya tidak terlalu berdampak buruk terhadap kurs. Di negara-negara maju, pertaruhan politik dan faktor kurs sudah menjadi dua variabel yang hampir tidak saling memengaruhi. Di Indonesia, kompetisi pilpres masih sering memicu kekhawatiran bagi pelaku bisnis dan ekonomi. Dalam situasi inilah okoritas monetar lebih dipusungkan dalam mengintervensi pasar, meluncurkan paket stimulus, normalisasi volume ekspor/impor, serta penyusutan BI rate.

Mengapa demikian? Hal itu terkait dengan *trust* (kepercayaan) pasar. Di negara yang tingkat korupsinya tinggi seperti Indonesia, pelaku pasar cenderung spekulatif dalam melihat situasi rupiah menjelang guncangan karena keraguan para pelaku ekonomi. Shagan Wei dari Columbia Business School, dalam bukunya yang berjudul *Corruption, Composition of Capital Flows, and Currency Crises* (2000), mengemukakan bahwa korupsi telah berdampak buruk terhadap komposisi masuknya modal asing (*capital inflows*) ke negara-negara berkembang.

Adaptanya, nilai mata uang di negara-ne-



O i e h

AUGUSTINUS SIMANDUNTAK

gara itu pun merosot tajam. Ketika korupsi menghantam pertahanan investasi asing (berupa kepercayaan dan kepastian hukum), investor, terutama dalam *direct investment*, memilih pindah ke negara lain. Padahal, situasi keuangan negara yang ditunggu investor tersebut telah bergantung pada investasi asing dan utang luar negeri dalam biaya-biaya pembangunan ekonominya.

Ekonomi India Sourindra Banerjee mengungkapkan hal yang sama ketika mata uang India (rupee) sempat terjungkal pada Agustus tahun lalu. Menurut dia, korupsi dan kronisme kaum kapitalis sangat berperan dalam kepanikan ekonomi India (investor menarik dananya ke luar) sehingga rupee merosot tajam terhadap USD. Merosotnya rupee itu merupakan gejala penyakit kronis ekonomi India yang gagal dibasmi pemerintah.

Rupiah dan Moralitas Ekonomi

Salah satu ciri pembangunan ekonomi pada era modernisme, aspek moral sering diabaikan para pengambil kebijakan. Ekonomi modern hanya menekankan pada profit dan pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif tan-

pa berusaha mengukurnya lewat tingkat integritas penyelenggara negara plus kualitas hidup warga negara. Padahal, korupsi telah banyak merusak lahan dan kualitas ekonomi sekaligus melencahkan daya tahan rupiah. Rakyat yang seharusnya bisa menikmati hasil-hasil pembangunan yang bermutu tinggi ternyata sering dihadapkan pada proyek-proyek pemerintah yang berkualitas rendah.

Anggaran proyek sering menjadi objek bancakan oleh oknum-oknum elite politik dan birokrat yang berkongkalikong dengan pengusaha hitam. Moral ekonomi, yang di dalamnya seharusnya terdapat budaya kerja koras, kejujuran, ketulusan, dan produktivitas tinggi, justru kian terpuruk. Para oknum yang korup tidak akan sanggup menjalankan roda ekonomi secara progresif dan bermoral. Mereka justru sering menghambat orang-orang yang idealis untuk berkarya di pemerintahan.

Jadi, aneh rasanya membahas soal krisis rupiah saat kejahatan ekonomi berskala besar belum tuntas diungkap dan diadili. Misalnya, kasus BI/BI (sejak 1998) yang sampai sekarang masih menysakan buron. Lalu, kasus *beilout* Bank Century (sejak 2006) yang hingga kini standanya belum menyentuh pengambil kebijakan. Juga, kasus Hambalang, kasus swap SKK Migas, dan seterusnya. Belum lagi kasus korupsi di berbagai instansi pusat dan daerah. Bukankah anjolannya rupiah pada 1997 disebabkan rusaknya sendi-sendiri perekonomian karena kolusi dan korupsi?

Sebagaimana diakui pembuat UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, konsideran undang-undang itu menyatakan: *Aktifitas tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini (Orde Baru), selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, korupsi juga menghambat pertumbuhan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.*

Jadi, kita tidak mungkin menaikkan pertumbuhan ekonomi jika korupsi masih terus merajalela ditambah birokrasi. Apalagi korupsi di level elite biasanya sulit terdeteksi. Para pelakunya tidak lagi melakukan korupsi secara konvensional, melainkan korupsi secara sistemis melalui korupsi politik dan hukum dalam membuat kebijakan yang membawa keuntungan bagi si pembuat kebijakan serta kelompoknya. Para pelakunya pun berusaha mengkreasi suatu sistem pertanggungjawabannya kebijakan yang kabur dan menyalpkan celah untuk melotuskan diri dari jerat hukum (Croall, 1993).

Oknum birokrat bisa saja bekerja sama dengan korporasi swasta dalam mengempiang uang negara. Misalnya, melalui isu bantuan sosial atau darurat ekonomi, para oknum birokrat menggolongor dana dari kas negara ke korporasi dengan format bantuan atau pinjaman. Lalu, pemilik atau pengelola korporasi dengan bebas menggunakan dana itu untuk kepentingan diri atau kelompoknya. Apalagi mereka suka menghamburkan uangnya di luar negeri. Hal itu juga ikut melemahkan rupiah. Inilah tantangan bagi presiden mendatang.

** Dosen etika bisnis Program*

Manajemen Bisnis FE Universitas Kristen Petra, Surabaya (augustinm@peter.petra.ac.id)